

TAHUN
2023

Laporan Kinerja



BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Laporan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan ini mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Selanjutnya, Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa di dalam laporan ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun sistematika penulisannya. Harapan kami semoga Laporan Kinerja Badan Penghubung ini dapat menjadi gambaran umum kinerja Badan Penghubung selama Tahun 2023 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas publik serta dalam meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Jakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG


ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi. Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Oleh karena itu, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai unsure penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja Badan Penghubung tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET KINERJA 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN TAHUN 2023
1	2	3		4	5	6
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100,00%
		b.	Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100,00%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1					100,00%
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a.	Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.	12 kali	13 kali	108,33%
		b.	Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	4 kali	4 kali	100,00%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2					104,17%

3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75,00%
		b.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3						108,33%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (63.83)	96,71%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4						96,71%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	-	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78.20)	Baik (81,50%)	104,22%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5						104,22%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5						102,69%

Berdasarkan Tabel Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 5 Sasaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mencapai **102.69** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja **7** (tujuh) indikator adalah **Sangat Tinggi** sedangkan **1** (satu) lainnya dengan capaian **Sedang**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ini telah pulihnya situasi ekonomi dan pariwisata sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan acara dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategisnya.

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

- f. Koordinasi yang baik dengan Instansi/Lembaga/Pemerintah Kabupaten Kota, Pihak Swasta serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah;
- g. Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
1. Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
1.a. Tugas Badan Penghubung.....	2
1.b. Fungsi Badan Penghubung	2
1.c. Struktur Organisasi Badan Penghubung.....	3
1.d. Sumber Daya Manusia.....	4
1.e. Anggaran	9
1.f. Inventarisasi Asset	9
B Aspek Strategis	11
C Permasalahan Utama (Strategis Issued) Organisasi	14
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	19
A Rencana Strategis.....	18
B Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	25
A Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	25
B Hasil Pengukuran Kinerja.....	26
C Capaian Kinerja Organisasi	27
D Realisasi Anggaran.....	131
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Sub Bagian	8
Tabel 1.5	Rincian dan Jumlah Tenaga Outsourcing Tahun 2023	9
Tabel 1.6	Aset Badan Penghubung	10
Tabel 1.7	Data Barang Inventaris Badan Penghubung	11
Tabel 1.8	Aspek Strategis Badan Penghubung	13
Tabel 2.1	Kesesuaian Program Badan Penghubung dengan RPJMD	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Badan Penghubung Tahun 2023	26
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan	29
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Terwujudnya kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah	31
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, PemDa Lainnya, perwakilan Asing Lembaga Non Pemerintah yang dilayani	32
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, PemDa Lainnya, perwakilan Asing Lembaga Non Pemerintah yang dilayani Tahun 2022 dan 2023	35
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, PemDa Lainnya, perwakilan Asing Lembaga Non Pemerintah yang dilayani s.d Periode akhir Renstra	36
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, PemDa Lainnya, perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani	37
Tabel 3.9	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan	38
Tabel 3.10	Persentase Capaian Indikator Kinerja Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	39
Tabel 3.11	Perbandingan antara Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani Tahun 2022 dan 2023	40

Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani sampai Periode Akhir Renstra	41
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	42
Tabel 3.14	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	43
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat pada Tahun 2022	44
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan	44
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Aktivitas Koordinasi Dengan perantau yang dilaksanakan Tahun 2022 dan 2023	47
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Aktivitas Koordinasi Dengan perantau yang dilaksanakan Tahun 2022 dan 2023	47
Tabel 3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Persentase Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan	49
Tabel 3.20	Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang Dilaksanakan	49
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang Dilaksanakan	50
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2023 dengan 2022	53
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra	53
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Jumlah pembinaan Generasi muda rantau yang dilaksanakan	55
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	56
Tabel 3.27	Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini	57
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2023 dengan 2022 Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah	65
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra	65
Tabel 3.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat	67
Tabel 3.31	Realisasi Capaian Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	68
Tabel 3.32	Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat	68
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2023 dengan 2022 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah	77
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra	78
Tabel 3.35	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat	79
Tabel 3.36	Realisasi Capaian Kinerja fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan	79
Tabel 3.37	Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	80
Tabel 3.38	Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	82
Tabel 3.39	Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023	83
Tabel 3.40	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dan 2022	84
Tabel 3.41	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN ORGANISASI

1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan (kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan pemerintahan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah Jabatan Administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat eselon III yang tidak dilakukan pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota negara (Pusat Pemerintahan). Badan Penghubung Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas dibentuk untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan komunikasi serta administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 2 huruf e bahwa Badan Penghubung adalah salah satu Perangkat Daerah yaitu Badan Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur – DKI Jakarta (Gedung Hotel Balairung Lantai 4). Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/kantor tersebut dengan sistem sewa

kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/kantor yang ditempati adalah sekitar 416 m² dengan sistem sewa per tahun. Jika dilihat dari letak/lokasi kantor berada pada posisi strategis, dimana hal ini menjadi keuntungan dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak lainnya (*stakeholders*).

a. Tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa ***"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara"***. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : ***"Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang"***.

Tugas pokok Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah ***"Membantu Gubernur Untuk Menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat"***.

b. Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat memiliki sejumlah fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah :

1. Perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
2. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2017 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang awalnya merupakan UPTD dari Dinas Pariwisata bergabung dengan Badan Penghubung.

c. **Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”. Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

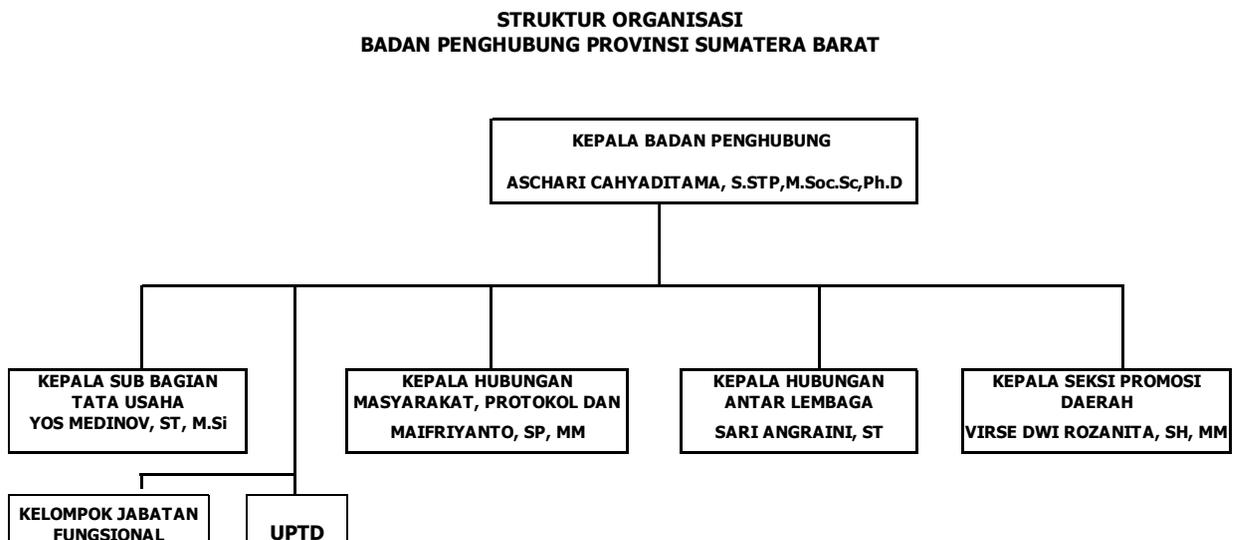
- a. **Kepala Badan** selaku pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung
- b. **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- c. **Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.
- d. **Seksi Hubungan Antar Lembaga**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- e. **Seksi Promosi Daerah**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat



d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian/Seksi pada tahun 2023 berjumlah 45

orang Aparatur Sipil Negara. Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisi pegawai tersebut terdiri dari 21 orang laki-laki (47.00%) dan 24 orang perempuan (53.00%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jauh antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang berarti dapat mendukung secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	21 orang
2.	Perempuan	24 orang
	Total	45 orang

Secara grafik dapat digambarkan pada Grafik 1.1.berikut :



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2023

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 1.2 :

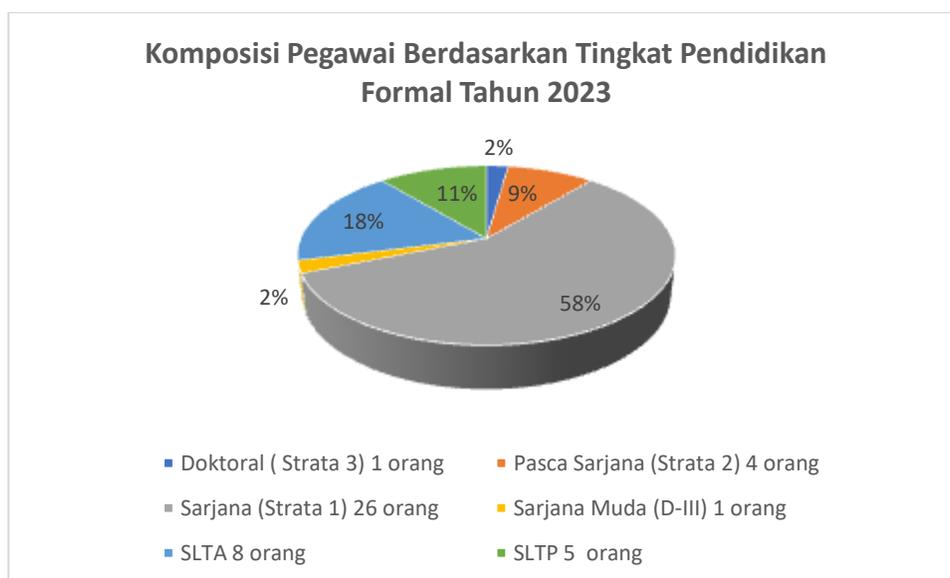
Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Doktoral (Strata 3)	1 orang	2%
2.	Pasca Sarjana (Strata 2)	4 orang	9%
3.	Sarjana (Strata I)	26 orang	58%
4.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang	2%

5.	SLTA	8 orang	18%
6.	SLTP	5 orang	11%
	<i>Jumlah</i>	45 orang	100%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang terdiri dari 58% pegawai sudah berpendidikan minimal sarjana, 2% Diploma, namun sebanyak 18% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sementara sisanya 11 % tamatan SLTP yang harus mengikuti pendidikan non formal dan ujian penyetaraan ijazah untuk bisa naik pangkat ke golongan ruang selanjutnya. Sehingga dianggap penting adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2023



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2023

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai golongan IV	4 orang	9%
2	Pegawai golongan III	30 orang	67%
3	Pegawai golongan II	11 orang	24%

	<i>Jumlah</i>	45 orang	100%
--	---------------	----------	------

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 67% pegawai Badan Penghubung adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut komposisi pegawai Badan Penghubung per golongan ditunjukkan dalam grafik 1.3 berikut.

Grafik 1.3
Komposisi pegawai Badan Penghubung per golongan



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2023

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Sub Bagian Tahun 2023

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah	Persentase
1.	Sub Bagian Tata Usaha	19 orang	42%
2.	Seksi Promosi Daerah	7 orang	16%
3.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	8 orang	18%
4.	Seksi Humas Protokol dan Pelayanan	11 orang	24%
	Jumlah	45 orang	100%

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 42 % pegawai berada di Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan sebanyak 16 % jumlah pegawai yang ditempatkan pada Seksi Promosi Daerah yang mencakup juga Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu di Seksi Humas Protokol dan Pelayanan terdapat 11 orang pegawai atau sebanyak 24 %, dan penambahan pegawai dari tenaga *outsourcing* sebanyak 19 orang pada seksi ini untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tamu dan Pimpinan Daerah serta peliputan pada Badan Penghubung. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing Seksi/ Sub Bagian dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing Seksi/ Sub Bagian



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2023

Selain pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Daerah, pada Badan Penghubung juga dipekerjakan pegawai dengan status *outsourcing* yang dibutuhkan dan ditempatkan pada masing-masing Sub Bagian Tata Usaha (tenaga kebersihan dan satpam pada Asrama Mahasiswa di Bogor), tenaga supir dan administrasi pada Seksi Humas Protokol dan Pelayanan serta tenaga keamanan dan kebersihan di Seksi Promosi Daerah (penempatan pada Anjungan Sumatera Barat TMII). Hal ini dikarenakan masih banyak dibutuhkan tenaga tambahan yang tidak dapat dipenuhi dari pegawai ASN. Rincian dari masing-masing tugas tenaga kontrak (*outsourcing*) tersebut adalah :

Tabel 1.5.
Rincian dan Jumlah Tenaga Outsourcing Tahun 2023

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah
-----	------------------	--------

1.	Tenaga Penunjang Administrasi	6 orang
2.	Sopir	14 orang
3.	Tenaga Keamanan	7 orang
4.	Tenaga Kebersihan	8 orang
	Jumlah	35 orang

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2023

e. Anggaran

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran Pendapatan sebesar **186.875.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 94.620.000,00,-** (**50,63 %**) dan Belanja Daerah sebesar Rp. **19.324.990.890,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 18.463.868.605,** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 861.122.285,-.** Adapun realisasi Belanja pada akhir Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi sebesar Rp. **17.764.536.647,-(96.21%)** sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp **738.069.150,- (85.71%)**. Jumlah total realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.**18.502.605.797,-** atau mencapai **95.74%** dari total Anggaran Belanja.

f. Inventarisasi Asset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan sampai dengan Tahun 2023 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan pembelian/ pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Aset Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

No	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4

1	Kendaraan Roda Empat	15 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik
3	Inventaris Kantor	-	Baik

Sumber : Data Aset Badan Penghubung 2023

Tabel 1.7
Data Barang Inventaris Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Nama Barang	Volume (unit)	Keterangan (Kondisi %)
1	Komputer PC	42	90
2	Komputer (Laptop)	7	90
3	Mesin Tik Listrik	3	80
5	Printer	16	90
6	Printer Dot Matrik	6	90
7	Printer Warna	7	80
8	Printer Foto	1	99
9	Camera	2	80
10	Handy cam	1	80
11	Handy talky	4	95
12	Mobil (Innova)	6	98
13	Toyota Rush	1	100
14	Mobil (Avanza)	1	70
15	Mobil (Altis)	1	80
16	Mobil (Camry)	3	85
17	Fortuner	1	95
18	Bus	2	97
19	Sepeda Motor	4	85
20	Foto Copy	2	90
21	Note Book	7	80
22	Mesin Penghancur Kertas	1	70
23	Mesin Absensi Finger Print	3	85
24	Mesin Potong Kertas	1	70
25	Lemari Es	3	90
26	Lemari Es dua pintu	2	95
27	Mesin Jet pump otomatis	2	97
28	Pompa air	2	80
29	Toren air	1	99
30	Dispenser	15	98
31	Komputer PC Kiosk	1	90
32	Peralatan Jaringan Komputer	1	95
33	Proyektor/Infocus	1	95
34	Telepon	3	94
35	Smart Phone	1	98
36	Faximile	3	99

37	Server Kiosk	1	90
38	Scanner	1	89
39	Ac	17	80
40	Kipas Angin	10	75
41	TV	3	85
42	CCTV	1	60
43	Pompa Air	2	90
44	Filling Kabinet	8	90
45	Meja belajar	64	80
46	Meja Administrasi	2	90
47	Meja Serba Guna	10	80
48	Lemari Pustaka	4	90
49	Korsi Hadap Administrasi	4	85
50	Kursi ruang tunggu	11	80
51	Kursi ruang tunggu dan kursi balkon	17	90
52	Meja komputer	10	80
53	Tempat tidur	32	80
54	Tempat tidur besi bertingkat	49	85
55	Tempat tidur besi	2	85
56	Meja rapat	1	65
57	Meja makan lipat	4	80
58	Kursi Rapat	25	80
59	Kursi Tamu	98	80
60	Kursi Sofa Besar	1	75
61	Sofa Sice	2	80
62	Sofa Tamu	4	85
63	Matras	162	80
64	Lemari	164	65
65	Vacum Cleaner	1	90
66	Mesin Potong rumput	4	95
67	Alat mesin potong rumput	1	65
68	Cooling Fan	4	80
69	Lemari Dapur	1	50
70	Kompor Listrik	1	100
71	Kompor Gas	3	60
72	Microwave	1	90
73	Tabung Gas	3	80
74	Speaker	2	80
75	Wireless Toa	1	80
76	Wireless Portable	1	80
77	Mic Conference	1	80
78	Tangga lipat	2	100
79	Cermin kaca dinding	6	98
80	Meja pustaka	2	65
81	Fitrin Ukiran	16	70
82	Meja Staf	5	70
83	Meja Kerja Pejabat	3	80
84	Meja kerja	3	90
85	Kursi kerja kepala	1	90
86	Kursi kerja	1	60
87	Lemari Buku	10	80
88	Lemari Arsip	5	80
89	Meja kerja pejabat	3	97

Sumber : Data Aset Badan Penghubung Tahun 2023

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam beberapa poin berikut: Letak/ Posisi Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/ Lembaga. Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari Sarana dan Prasarana Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai dalam melayani pejabat daerah yang betugas di Jakarta dan pelaksanaan tupoksi lainnya. Promosi dan Publikasi melalui media, website <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>, media cetak dan elektronik serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah di Sumatera Barat. Dilihat dari lokasi/ letak Badan berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut:

Tabel 1. 8 Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	Letak/ Posisi	Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Badan Kementerian/ Lembaga Pusat lainnya	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari
2	Sarana dan Prasarana	Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan Badan, Gedung bangunan kantor beserta Rumah Gadang di Anjungan Sumatera Barat, Gedung Asrama di Bogor dan Yogya serta peralatan rumah tangga yang cukup memadai	Dalam melayani pejabat daerah yang betugas di Jakarta dan pelaksanaan Tupoksi lainnya, serta <i>stakeholder</i> Badan Penghubung lainnya.
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak dan elektronik serta website Badan Penghubung https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/ serta https://www.sumbarprov.go.id	Melalui kerjasama dengan RRI, TVRI, TV Padang dan pihak media lain selain itu promosi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah melalui website

			Badan Penghubung
4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi kementerian/ lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan daerah
5	Sosial Budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/ Paguyuban Perantau Minang yang ada/ berpusat di Jakarta	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai, anggaran dan sebagainya);
- c. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dan dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
- d. Adanya Website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat/gagal mencapai sasarannya. Kelemahan yang bisa menjadi penghambat untuk mencapai tujuan organisasi antara lain:

- a. Status eselonering yang masih terbatas (eselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis;
- b. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat;
- c. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) yang menyebabkan susahny mendapatkan data atau bahan-bahan promosi yang memadai tentang industri, kerajinan, kesenian dan sebagainya dari daerah secara tepat dan akurat sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi pada pihak yang membutuhkan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi BadanPenghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- a. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;
- b. Badan Penghubung memiliki koordinasi yang baik dengan Kementrian Luar Negeri karena telah terdaftar sebagai Admin Aepsilon Provinsi Sumatera Barat (Pengurusan Passport Dinas) dan pihak penghubung penanggungjawab pengambilan dokumen/surat- surat dinas di ULA (Unit Layanan Administrasi) di OTDA Kementrian Dalam Negeri.
- c. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- e. Sumber Daya Perantau Minang yang cukup besar.

4. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah;
- b. Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (Badan/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung menjadi berkurang;
- c. Dinamika sosial politik.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara internal maupun dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

a. **Kurang berfungsinya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Sumatera Barat.**

Fungsi penting lainnya yang diemban Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah dalam pelayanan informasi daerah dan penyelenggaraan promosi daerah ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki budaya yang sangat beragam dan ditunjang dengan banyak destinasi wisata yang menarik serta kuliner yang sangat banyak. Tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Sumatera Barat. Sarana dan prasarana promosi mengenai Sumatera Barat ini dirasa masih kurang. Perlu adanya anggaran yang fokus mengenai promosi kebudayaan dan pariwisata agar Sumatera Barat bisa sejajar dengan provinsi lain.

b. **Tidak meratanya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah di bidangnya.**

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikut sertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas.

c. Belum optimalnya peran lembaga dalam pelayanan koordinasi dan protokoler di Jakarta

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan dan protokoler bagi pejabat daerah Sumatera Barat di Jakarta seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan dilakukan, permasalahan kelembagaan pemerintah masih saja muncul. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pelayanan koordinasi dan protokoler. Optimalisasi peran lembaga merupakan salah satu faktor kunci bagi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Optimalisasi kelembagaan meliputi kemampuan institusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja serta meningkatkan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar, variatif dan mutakhir.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Dituntut untuk memiliki standar pelayanan yang berkualitas.
2. Kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelayanan.
3. Dituntut dalam pengelolaan informasi yang cepat, tepat dan memadai.

Disamping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau lembaga lainnya karena beralokasi di Jakarta.
2. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.
3. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan memadai.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN : a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia;
- b. Aspek Strategis Organisasi
- c. Permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II: PERENCANAAN KINERJA : memuat Ikhtisar/Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA : a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja,
- b. Hasil Pengukuran Kinerja,
- c. Capaian Kinerja Organisasi yang disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut;
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

d. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- : simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”,

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam 7 (Tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dari 7 misi tersebut di atas, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menunjang dalam pencapaian misi Provinsi Sumatera Barat khususnya pada misi yang ketujuh yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran ke 1 dan 3 yaitu “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” . Melalui sasaran 1 dan 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
 - a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Penghubung juga perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Tujuan

Tujuan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :

- a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
- c. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - d. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Sasaran

Adapun sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
 - 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
 - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera.
 - 3) Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1). Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
 - b. Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi
 - c. Meningkatkan pengawasan internal organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Pada tabel berikut dapat dilihat kesesuaian program Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.1
Kesesuaian Program Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

Misi : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS

TUJUAN KEPALA DAERAH 2021-2026	SASARAN 2021-2026	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
1. Meningkatkan kinerja birokrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas koordinasi dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya	Program Pelayanan Penghubung	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan		
	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan perantau	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat		
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan perangkat daerah provinsi terhadap masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung		

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur. Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023 mengacu kepada Renstra SKPD Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar untuk mengukur kinerja Badan Penghubung untuk Tahun 2023. Pada Laporan Kinerja Badan Penghubung Tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Mempertimbangkan sumberdaya, telah ditetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali

		2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 12 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	66.00 (B)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	78.20 (Baik)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 5.999.147.356,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.734.495.127,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 18.733.642.483,-	

Pada bulan November tahun 2023, terjadi perubahan APBD pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan. Namun, untuk target, sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan 2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	12 kali 4 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 12 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	66.00 (B)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	78.20 (Baik)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 6.808.402.430,-	APBD-P
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.516.588.460,-	APBD-P
	JUMLAH	Rp. 19.324.990.890,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Hakikat dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan salah satu pilar prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh OPD. Laporan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria tercantum pada tabel dibawah berikut ini:

Menindaklanjuti arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pengukuran kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- 2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisis pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat menjadi pembenaran logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **102,69% (Sangat Tinggi)** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100,00%
		b. Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1					100,00%
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a. Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.	12 kali	13 kali	108,33%
		b. Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	4 kali	4 kali	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 2					104,17%
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75,00%
		b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3					108,33%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (63.83)	96,71%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					96,71%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78.20)	Baik (81,50%)	104,22%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5					104,22%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5					102,69%

Sumber: Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat

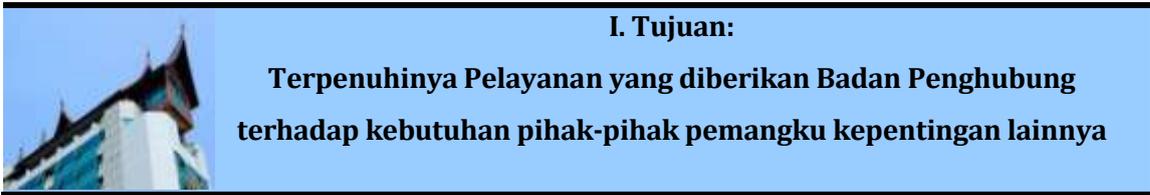
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 5 Sasaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mencapai **102.69** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja 7 (tujuh) indikator adalah **Sangat Tinggi** dan 1 (satu) lainnya dengan capaian **Sedang**.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga dilakukan analisis dengan membandingkan hasil capaian indikator kinerja utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2023 dan juga mengaitkan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:



I. Tujuan:
Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya

Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Capaian indikator ini dihitung dengan cara membandingkan antara Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dengan Target pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dalam persentase.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi pelaksanaan

promosi potensi dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan Target pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah dalam persentase.

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan	12 kali	9 kali	75%	Sedang
Rata-rata Capaian				87,50%	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat rata-rata pencapaian indikator kinerja utama tujuan tercapai sebanyak **87,50%** dengan kategori **Tinggi**. Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2023 adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta

pemangku kepentingan lain mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi yang artinya seluruh kegiatan, urusan, kepentingan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat /Asing maupun sebaliknya, organisasi Masyarakat Minang baik perantau maupun Mahasiswa Minang pada Asrama yang dikelola telah memenuhi target dan dapat dilayani serta difasilitasi dengan baik oleh Badan Penghubung.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan
Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2023 adalah:

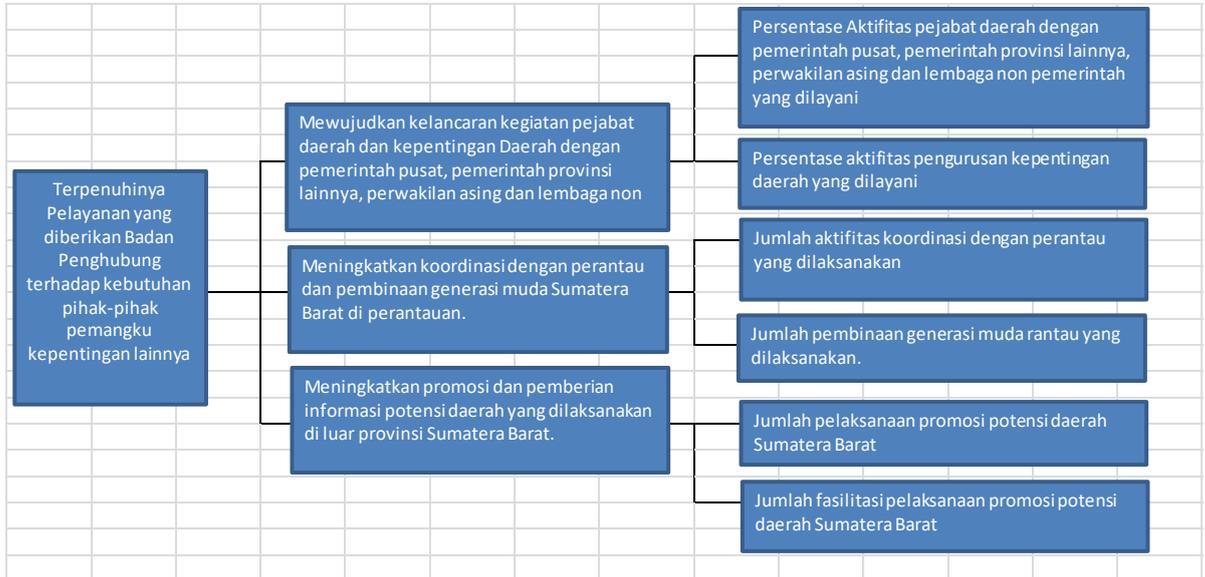
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$75\% = \frac{9 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2023 Badan Penghubung telah melaksanakan promosi potensi daerah serta penyebarluasan informasi daerah dengan baik sebanyak 9 kali kegiatan yang dilaksanakan secara langsung untuk promosi potensi kesenian daerah dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mencapai 75 % dari target yang telah ditetapkan dengan kriteria Sedang.

Tujuan Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya dicapai dengan menetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Tujuan, Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator



Penjelasan rinci masing-masing Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Penghubung yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1

Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selaku OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jakarta bertugas untuk menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat dan pengurusan administrasi kepentingannya.

Untuk mengetahui pencapaian sasaran strategis pertama ini, ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.
2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.

Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung.

Capaian kinerja Badan Penghubung dalam rangka melaksanakan pelayanan demi terwujudnya kelancaran kegiatan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2023	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

1. Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Indikator

Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2023	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator pelaksanaan pelayanan fasilitasi aktivitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani **Sangat Tinggi (realisasi 100%)** sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini berarti setiap permintaan untuk pelayanan kegiatan Pimpinan Daerah di Jakarta ataupun luar Sumatera Barat dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Bentuk pelayanan dan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melancarkan kegiatan Pimpinan Daerah selama tahun 2023 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Pejabat Daerah/Tamu Yang Dilayani

Pengukuran kinerja indikator jumlah pelaksanaan pelayanan fasilitas pejabat daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan Sub Kegiatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang terdiri dari pelayanan pimpinan daerah di Jakarta dan luar Sumatera Barat mulai dari fasilitas mobilisasi dan penugasan protokol untuk mendampingi dan melayani baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pimpinan daerah ada yang bersifat rapat koordinasi, kunjungan kerja, penerimaan penghargaan, undangan, penyerahan bantuan bencana alam dan pertemuan

dengan tokoh, perantau, mahasiswa Minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan kegiatan dapat dirinci kunjungan ke Jakarta dan luar Jakarta antara lain:

- Rapat-rapat koordinasi bersifat nasional di Jakarta sebanyak 11 kali kegiatan
- Penerimaan penghargaan di Jakarta sebanyak 20 kali kegiatan
- Pertemuan dengan tokoh tokoh masyarakat Minang di Jakarta 10 kali kegiatan
- Kegiatan menghadiri rapat-rapat koordinasi kegiatan di Luar Jakarta yaitu rapat-rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, Penerimaan Penghargaan, Penyerahan Bantuan Bencana Alam, event-event Nasional, Pertemuan dengan tokoh masyarakat Minang, mahasiswa daerah yang dikunjungi antara lain, Kota Medan, Batam, Kota Jambi, Kota Palembang, Bandar Lampung, Labuan Bajo, Kota Yogyakarta, Bali, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Makasar, Kota Cimahi dan Cianjur.
- Pelayanan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat sebanyak 229 kali kegiatan.

b. Jumlah Konsultasi Pemerintah Daerah Yang Difasilitasi

Sehubungan dengan fungsi Badan Penghubung dalam hal fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 25 kali fasilitasi konsultasi pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari :

- Rapat Koordinasi FORKAPPSI dengan Otorita Ibukota Nusantara di Ibukota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 November 2023
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Kementrian/Lembaga Tinggi Negara
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Lembaga Non Pemerintahan (Swasta/Kedutaan Besar Negara Lain)
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Daerah Lain
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Organisasi Perantau, dan Mahasiswa diluar Provinsi Sumatera Barat

c. Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan

Dalam melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkat nya dalam pelaksanaan tugas diluar provinsi Sumatera Barat, Badan Penghubung melaksanakan publikasi kegiatan pimpinan daerah. Pada Tahun 2023, kegiatan publikasi media

terlaksana sebanyak **63** (enam puluh tiga) kali. Publikasi kegiatan pimpinan daerah ini di *upload* pada portal media resmi Sumatera Barat yaitu <https://www.sumbarprov.go.id/> dan *website* Badan Penghubung <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>.

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pelayanan kegiatan pimpinan daerah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{260 + 25 + 63 \text{ kali}}{348 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat daerah dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan pelayanan dengan baik.

1.2.Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani Tahun 2023, 2022 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022 (n-1)	CAPAIAN 2021 (n-2)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan Capaian tahun-tahun sebelumnya yang juga memenuhi target 100%, pada tahun 2023 intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah meningkat karena seiringan dengan padatnya jadwal dan undangan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menambah permintaan intensitas pelayanan sehingga harus dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* dari *Outsourcing* sehingga memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani. Selain itu untuk menambah kualitas pelayanan pimpinan dari sarana prasarana juga dilaksanakan sewa kendaraan operasional pada tahun 2023.

1.3 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan target jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang

Dilayani tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan artian karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Peningkatan intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah sehubungan dengan padatnya jadwal dan undangan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat.
- b). Penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* dari tenaga *outsourcing* sehingga memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani.
- c). Dilaksanakannya penambahan Sarana Prasarana penunjang Pelayanan Pimpinan dan Tamu Daerah melalui mekanisme Sewa Kendaraan Operasional.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah didukung oleh ketersediaan Personil pelayanan pada Seksi Humas Protokol dan Pelayanan yang saat ini berjumlah 11 orang ASN serta didukung 20 orang tenaga *outsourcing* yang terdiri dari tenaga sopir dan protokol pelayanan yang bertugas dalam pelayanan pejabat dan pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat di luar provinsi.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Ketersediaan Asset Badan Penghubung berupa kendaraan dinas operasional yang berada dalam kondisi baik merupakan salah satu sarana utama dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan kelancaran aktivitas pejabat dan pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan pimpinan telah dilaksanakan penambahan sarana kendaraan operasional pelayanan pimpinan daerah melalui mekanisme Sewa Kendaraan operasional.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani dengan target 100% pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 5.549.661.030,- dengan realisasi sebesar Rp 5.412.317.287,- atau sebesar 97,53%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 5.549.661.030,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100.00%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 5.412.317.287,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp } 5.549.661.030 \times 100.00\%) - \text{Rp } 5.412.317.287}{(\text{Rp } 5.549.661.030 \times 100.00\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 5.549.661.030 - \text{Rp } 5.412.317.287}{\text{Rp } 5.549.661.030} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 2.47 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 2.47% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp5.549.661.030,- yang terealisasi sebesar Rp5.412.317.287,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.00%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut diatas :

Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah
lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.072.528.804	2.950.100.289	96,02%	122.428.515
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.477.132.226	2.462.216.998	99,40%	14.915.228

Sumber: Data Realisasi Badan Penghubung 2023

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan Anggaran yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator masing-masing 3.98 % dan sebesar 0,60%. Efisiensi yang dilakukan antara lain:

- ✓ Efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Barang Pakai Habis berupa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang digunakan sesuai kebutuhan Pelayanan Pimpinan;
- ✓ Efisiensi Belanja Jasa Pengamanan dalam hal ini Patwal kegiatan pimpinan dengan cara pengaturan jadwal pelayanan kegiatan pimpinan daerah pada saat di Jakarta/luar Sumatera Barat.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani di dukung oleh Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung yang secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik (

Realisasi keuangan masing-masing 96.02% dan 99.40% dan Fisik 100%), hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan Badan Penghubung	12 bulan	12 bulan	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Kegiatan Badan Penghubung 2023

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pertama dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik.

2. Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani

2.1. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Persentase Capaian Indikator Kinerja Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dalam lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai fungsi Badan Penghubung, berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani tergolong **Sangat Tinggi (Realisasi 100%)** sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran indikator ini dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pengurusan kepentingan daerah di Pusat. Bentuk pengurusan kepentingan daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Surat Izin Yang Difasilitasi

Untuk mencapai sasaran indikator ini dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pengurusan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Pusat. Tugas rutin yang dilaksanakan adalah pengurusan izin keluar negeri bagi pejabat Pemerintah Sumatera Barat. Pada Tahun 2023 Badan Penghubung telah melakukan Pengurusan surat izin perjalanan luar negeri sebanyak **65** kali.

b. Jumlah Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang diurus

Badan Penghubung melalui Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat juga melakukan fasilitasi pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2023 Badan Penghubung telah berhasil membantu fasilitasi pengurusan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan Pembahasan Peraturan Gubernur serta Surat dari Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Surat Keputusan yang diurus dihitung berdasarkan Surat Keputusan yang diambil dan diserahkan OPD terkait. Realisasi pengurusan Surat Keputusan ini antara lain Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Mutasi dan Surat Keputusan Pindah Tugas ASN dari dan keluar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rinciannya dapat dibagi sebagai berikut:

- Pembahasan Peraturan Gubernur sebanyak 6 dokumen
- Surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi sebanyak 38 dokumen
- Surat Keputusan termasuk kenaikan pangkat, SK Mutasi dan SK Pindah Tugas sebanyak 203 dokumen

Semua Surat Keputusan dapat dibantu pengurusannya dan berhasil difasilitasi, dengan demikian dapat dilihat Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{65 \text{ Surat Izin} + 247 \text{ Surat Keputusan}}{65 \text{ Surat Izin} + 247 \text{ Surat Keputusan}} \times 100\%$$

Dari Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja kedua dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Pertama Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan Pejabat Daerah dan pengurusan administrasi kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, perwakilan asing dan Lembaga Non Pemerintah

dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan Realisasi Capaian **100% (Sangat Tinggi)**.

2.2 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani Tahun 2023, 2022 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022 (n-1)	CAPAIAN 2021 (n-2)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Dibandingkan realisasi tahun 2021 (fasilitasi pengurusan surat izin luar negeri sebanyak 4 kali dan fasilitasi pengurusan 56 lima puluh enam Surat Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah) dan tahun 2022 (total 31 kali pengurusan Izin dan 28 Surat Kepentingan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat) terjadi peningkatan intensitas jumlah pengurusan surat keputusan dan izin dari Pemerintah Daerah menjadi total 65 kali pengurusan Izin Luar Negeri dikarenakan peningkatan aktifitas dan kegiatan pimpinan Daerah yang walaupun secara persentase tetap, yang artinya semua permintaan pengurusan kepentingan daerah yaitu izin dan kepentingan daerah dapat dilayani dengan baik.

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung yakni pengurusan setiap kepentingan daerah pada pemerintah pusat.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Sangat Baik dengan artian karena semua permintaan pengurusan kepentingan daerah, baik itu surat izin ataupun surat keputusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat diselesaikan dengan baik. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Dengan adanya sistem digitalisasi pada Kementerian untuk pengurusan SK, surat-surat izin, pengurusan paspor dan rekomendasi visa (SIOLA, SIMPEL, AEPSILON) dapat memudahkan pemerintah dalam menjalankan proses koordinasi, konsultasi dan pelayanan. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta pada Kementrian Sekretariat Negara dalam hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat.
- b). Koordinasi yang baik dengan Kementrian dan Lembaga di Pemerintah Pusat dalam hal pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani didukung oleh A S N personel Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta pada

Kementrian Sekretariat Negara dalam hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah dengan Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani dengan target 100% pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 421.833.400,- dengan realisasi sebesar Rp 415.465.445,- atau sebesar 98.49%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 421.833.400,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100.00%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 415.465.445,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp } 421.833.400 \times 100.00\%) - \text{Rp } 415.465.445}{(\text{Rp } 421.833.400 \times 100.00\%)} \times 10$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 421.833.400 - \text{Rp } 415.465.445}{\text{Rp } 421.833.400} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1.51\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 1.51% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 421.833.400,- yang terealisasi sebesar Rp 415.465.445,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.00%. Berikut pada tabel dibawah dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan daerah yang dilayani. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	421.833.400	415.465.445	98,49%	6.367.955

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

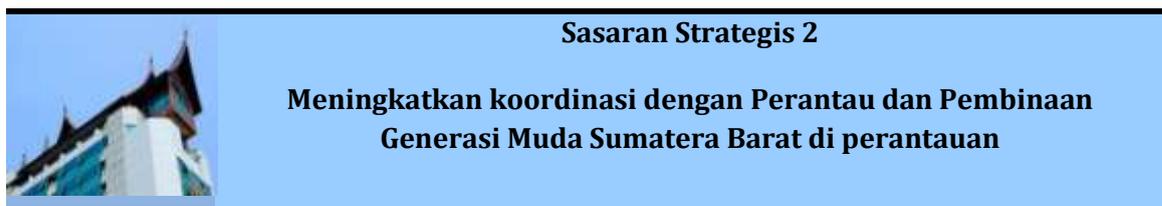
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktivitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur	Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya	20 kali	20 kali	100,00%
		Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau	20 kali	20 kali	100,00%
Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat		25 kali	25 kali	100,00%	

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Persentase aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani tercapai sesuai target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Sumber Daya Perantau Minang merupakan potensi kekuatan yang dimiliki Provinsi untuk mengembangkan potensi daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu Badan Penghubung terus menjalin komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban Perantau Minang yang ada/ berpusat di Jakarta atau luar Provinsi lainnya, selain itu Badan Penghubung juga intens membina dan menjalin komunikasi dengan perantau yang berasal dari Generasi muda Minang. Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator, yaitu:

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan pada Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	13 kali	108,33 %	Sangat Tinggi
2	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100,00 %	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di Perantauan” dijelaskan lebih lanjut pada bab ini:

1. Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	13 kali	108.33 %	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai 108.33% dari target yang ditetapkan dan termasuk kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2023 lebih banyak kegiatan koordinasi yang terlaksana, disebabkan mulai banyaknya undangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Minang di perantauan. Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga, Ikatan Keluarga Minang baik di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah aktivitas koordinasi dengan organisasi masyarakat perantau yang dilibatkan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang melibatkan organisasi masyarakat di rantau.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi dan mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat Minang di perantauan, yaitu antara lain :

1. Koordinasi dengan Perantau Solo tanggal 4 Maret 2023
2. Koordinasi dengan Perantau Bogor tanggal 10 Maret 2023
3. Koordinasi dengan IKM Banten tanggal 19 Maret 2023
4. Koordinasi dengan IKMS Bali tanggal 22 Mei 2023
5. Koordinasi dengan IKA Banuhampu tanggal 18 Juni 2023
6. Koordinasi dengan IKM Yogya tanggal 21 Juni 2023
7. Koordinasi dengan Perantau 17 September 2023 dengan IKM Malang
8. Menghadiri kegiatan Pemerintah Kota Bogor bersama Bundo Kanduang Jawa Barat Urang Minang Baralek Gadang Tanggal 21 Oktober 2023
9. Pertemuan dengan Perantau Minang pada Acara Minangkabau Heritage 5 Oktober 2023 di JCC
10. Discovery West Sumatera 7 Oktober 2023, Perantau dengan Gubernur Sumatera Barat, Gebu Minang, IKM, Bundo Kanduang
11. Discovery West Sumatera 21 Oktober 2023, Bundo Kanduang DKI
12. Discovery West Sumatera 29 Oktober 2023, Pertemuan Wakil Gubernur dgn perantau
13. Menghadiri Acara " Salingka Agam Baralek Gadang tanggal 12 November 2023

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk non formal, diantaranya dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi perantau yang berada di Luar Sumatera Barat,

seperti Fasilitasi Pertemuan Pimpinan Daerah dengan IKM yang berada di Malang, Solo, Yogya, Bali, Banten dan daerah-daerah lainnya. Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebanyak 13 kali.



PERTEMUAN DENGAN IKM SE MALANG RAYA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2023



Discovery West Sumatera 7 Oktober 2023 di hotel Borobudur



Pertemuan dengan Bundo Kandung DKI Jakarta tgl 9 November 2023



Salingka Agam Baralek Gadang 12 November 2023



Discovery West Sumatera 29 Oktober 2023, Pertemuan Wakil Gubernur dengan Perantau

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pelaksanaan aktivitas koordinasi dengan perantau :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$108.33\% = \frac{13 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Pertama pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak 108.33% dengan kategori “ **Sangat Tinggi** ”

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas korrdinasi dengan perantau yang dilaksanakan
Tahun 2023, 2022 dan 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023 (n)	Capaian Tahun 2022 (n-1)	Capaian Tahun 2021 (n-2)
		2023				
		Target	Realisasi	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	13 kali	108,33%	116,67%	100,00%

Sumber: Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 dan 2022, pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terlaksana dengan baik namun secara kuantitas berkurang 1 kali kegiatan, dari 14 kali pelaksanaan di tahun 2022 menjadi 13 kali di tahun 2023 dikarenakan realisasi kegiatan berdasarkan undangan acara yang diterima oleh Badan Penghubung. Selain itu salah satu faktor pendorong yaitu telah pulihnya situasi pandemi di Indonesia dan tidak diberlakukan lagi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga telah memungkinkannya pelaksanaan kegiatan berkumpul bagi masyarakat.

1.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12	13	108.33%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.16 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra telah melebihi target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga maupun organisasi perantau Minang terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau tahun 2023 terealisasi sebesar 108.33% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Sangat Tinggi, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Telah berakhirnya pandemic COVID sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan koordinasi dengan perantau ataupun sebaliknya menghadiri acara yang diadakan oleh organisasi perantau Minang di luar Sumatera Barat;
- b). Koordinasi yang baik dengan Organisasi perantau Minang dalam rangka mengumpulkan database untuk perantau Minang (e-Rantau).

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan didukung oleh 2 orang ASN Analis Hubungan Antar Lembaga pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan perantau Minang serta organisasi masyarakat Minang yang berada di Jabodetabek serta luar Provinsi Sumatera Barat.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan perantau Minang di luar Provinsi Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Koordinasi

dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan dengan target 12 kali pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 13 kali dengan tingkat capaian sebesar 108.33%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 421.833.400,- dengan realisasi sebesar Rp 415.465.445,- atau sebesar 98.49%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 421.833.400,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 108.33%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 415.465.445,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.421.833.400} \times 108.33\%) - \text{Rp.415.465.445}}{(421.833.400 \times 108.33\%)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 9.08\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 9.08% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 421.833.400,- yang terealisasi sebesar Rp 415.465.445,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja sebesar 108.33%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya

indikator kinerja tersebut.

Tabel 3.19

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	421.833.400	415.465.445	98,49%	6.367.955

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya, Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya	20 kali	20kali	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai sesuai melebihi target sebanyak 108.33% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Badan Penghubung mengelola 3 Asrama Mahasiswa yaitu Asrama Mahasiswa Bogor, Asrama Mahasiswa Putra Merapi Singgalang Yogyakarta, Asrama Mahasiswa Putri Bundo Kandung Yogyakarta. Jumlah mahasiswa/i diasrama yang dilayani dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang menghuni asrama, yaitu sejumlah 32 orang di Asrama Putra Yogya, 26 orang di Asrama Putri Yogya dan 81 orang di asrama mahasiswa Bogor (39 orang Putra dan 42 orang Putri).

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100 %	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Pada tahun 2023 Badan Penghubung melaksanakan 4 (empat) kali kegiatan pembinaan Generasi Muda yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023 di Hotel Agria-Bogor. Peserta untuk kegiatan ini adalah sejumlah 100 orang, yang terdiri dari penghuni asrama dan mahasiswa Minang yang ada di Bogor dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Adat Budaya Minangkabau melalui Randai “ dengan Narasumber dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.



2. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Mahasiswa Minang Yogya

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 di Hotel Khas Malioboro Yogya. Peserta untuk kegiatan ini adalah sejumlah 100 orang, yang terdiri dari penghuni asrama dan mahasiswa Minang yang ada di Bogor. Tema Seminar adalah “Pengembangan Kepemudaan dan Kebudayaan Minang di Rantau” dengan Narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Sumatera Barat.



3. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Mahasiswa Minang di Malang
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023 bekerjasama dengan Dinas Kesbangpol Kota Malang dan bertempat di Aula Kantor Kesbangpol. Peserta untuk kegiatan ini adalah sejumlah 100 orang, yang berasal dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Minangkabau se- Malang Raya (IPMM).



4. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Bandung di Telkom University

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 bekerjasama dengan Mahasiswa–Mahasiswi Minang Telkom University yang berjumlah sekitar 100 orang.



Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{4 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kedua pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak 100% dengan kategori “ **Sangat Tinggi**”.

2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2021, 2022, 2023

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023 (n)	Capaian Tahun 2022 (n-1)	Capaian Tahun 2021 (n-2)
		2023				
		Target	Realisasi	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100%	100%	0 %

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2022, 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terlaksana sebanyak 3 kali, terdapat peningkatan pelaksanaan Pembinaan Generasi Muda sebanyak 1 kali pada tahun ini. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, kegiatan pembinaan generasi muda sama sekali tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun tersebut Indonesia masih berada dalam kondisi Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat pandemi COVID yang tidak memungkinkan terlaksananya kegiatan pembinaan generasi muda rantau oleh Badan Penghubung.

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan dibandingkan dengan Target periode akhir Renstra sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.17 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 100% dari target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan telah berakhirnya kondisi pandemi sehingga tidak ada lagi pembatasan kegiatan serta anggaran telah bisa dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan. Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi sekaligus pembinaan rutin terhadap Mahasiswa Minang yang berada di Asrama Yogyakarta dan Bogor serta melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung serta mahasiswa Minang rantau di Kota/Provinsi lain seperti Malang- Jawa Timur dan Bandung Jawa Barat .

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori

Sangat Tinggi, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Tidak ada lagi pembatasan kegiatan serta anggaran telah bisa dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan generasi muda rantau.
- b). Koordinasi yang baik dengan Mahasiswa rantau Minang di Provinsi lain dan melibatkan mereka secara aktif pada pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Tahun 2023.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan didukung oleh 1 orang ASN Pengolah Data Kelembagaan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan melakukan pembinaan dengan generasi muda Minang di Rantau.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melakukan pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan

dengan Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan dengan target 4 kali pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 4 kali dengan tingkat capaian sebesar 100.00%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 421.833.400,- dengan realisasi sebesar Rp 415.465.445,- atau sebesar 98.49%. Anggaran ini tersebar pada Program Pelayanan Penghubung pada Sub Kegiatan yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 421.833.400,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100.00%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 415.465.445,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}421.833.400 \times 100.00\%) - \text{Rp.}415.465.445}{(421.833.400 \times 100.00\%)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1.51 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 1.51% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 421.833.400,- yang terealisasi sebesar Rp 415.465.445,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.00%. Berikut dapat dilihat

program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Jumlah Pembinaan Genrasi Muda yang dilaksanakan.

Tabel 3.24

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah pembinaan Generasi muda rantau yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	421.833.400	415.465.445	98,49%	6.367.955

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat	4 kali	4 kali	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai sesuai dengan target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Sasaran Strategis 3

Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan sumber daya melimpah baik di bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kuliner, kependudukan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Sumber daya alam Sumatera Barat yang sangat produktif menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki potensi yang baik jika dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bermodal dengan keanekaragaman jumlah *home industry local* serta potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, maka untuk memperkenalkan sekaligus menjualnya kita perlu pengembangan daerah terutama pariwisata. Hal ini memerlukan upaya yang strategis dalam melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan pameran di daerah-daerah destinasi wisata unggulan dan populer dikalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam usaha menginformasikan serta menjual Potensi Unggulan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat kepada masyarakat luas dan salah satu usaha dalam meningkatkan arus investasi ke Sumatera Barat, pada tahun 2023 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan **Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya** serta **Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi dalam pengembangan/ sarana promosi sumber daya/ potensi yang ada di Sumatera Barat, Badan Penghubung berencana melaksanakan promosi potensi daerah Sumatera Barat dalam berbagai media dan kegiatan. Pada sasaran strategis ketiga Badan Penghubung yaitu Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dan Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat.

Tabel 3.26
Realisasi Kinerja Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75.00 %	Sedang
2	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67 %	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan Promosi dan pemberian Informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat ” dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat
1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Kinerja Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75.00 %	Sedang

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya dan Fasilitas Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya. Anjungan Sumatera Barat TMII adalah Sarana untuk mempromosikan Seni, Budaya, Pariwisata dan Kuliner yang terdapat di Sumatera Barat. Karena Anjungan merupakan *Show Window* dari Sumatera Barat dalam mengenalkan dan sekaligus mempromosikan kekayaan alam, seni budaya, kuliner kepada dunia. Anjungan Sumatera Barat merupakan salah satu Anjungan favorit yang banyak didatangi oleh para pengunjung baik Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara. Seiring dengan revitalisasi yang dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Sumatera Barat juga melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana sehingga makin menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut, hingga kuliner khas daerah.



Kunjungan Wakil Menteri Parekraf dan Direktur Keuangan TMII



Kunjungan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UI dan Australia



Kunjungan kapal pesiar MS HAL AMERICAN LINE di Anjungan Sumbar TMII

Pada tahun 2023 ini kita telah mencatat jumlah pengunjung yang datang ke Anjungan Sumatera Barat sebanyak :

1. Wisatawan Mancanegara = 10.842 orang
2. Wisatawan Lokal/Domestik = 20.520 orang

3. Mahasiswa/Pelajar = 31.049 orang

**Data kunjungan terlampir*

Mulai Tahun akhir tahun 2022, telah dilaksanakan penghitungan jumlah pengunjung Anjungan Sumatera Barat dengan cara Scan Barcode seperti dibawah ini:



Pada Tahun 2023, Badan Penghubung melaksanakan promosi potensi sebanyak 9 kali yaitu :

1. Pekan Lebaran Tanggal 23 -30 April 2023 bertempat di Anjungan Sumatera Barat TMII. Kegiatan ini menampilkan Kesenian khas Sumatera Barat serta bazaar makanan khas Sumatera Barat.
2. Pekan Liburan Tanggal 25 Juni -2 Juli 2023, kegiatan ini termasuk agenda wajib Taman Mini dan bertempat di Anjungan Sumatera Barat TMII dalam rangka menyambut Liburan Sekolah. Kegiatan ini juga menampilkan Kesenian Khas Sumatera Barat serta bazaar makanan khas Sumatera Barat.



3. Promosi dan Pameran Produk Unggulan di Km 0 Tugu Serangan 1 Maret Yogyakarta tanggal 22 Juni 2023.



4. Discover West Sumatera di Hotel Borobudur tanggal 1-29 Oktober 2023

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar event bertajuk Discover West Sumatra. Event ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta dan dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah pada tanggal 7 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan sebulan penuh selama bulan Oktober 2023. Rangkaian event Discover West Sumatra diantaranya adalah Festival Kuliner, Pagelaran Seni Budaya, serta adanya stand UMKM, Ekonomi Kreatif yang semuanya dibalut dengan nuansa Minangkabau. Kegiatan ini juga menjadi bagian untuk mempromosikan Sumatera Barat sekaligus mendukung program Visit Beautiful West Sumatera 2023.



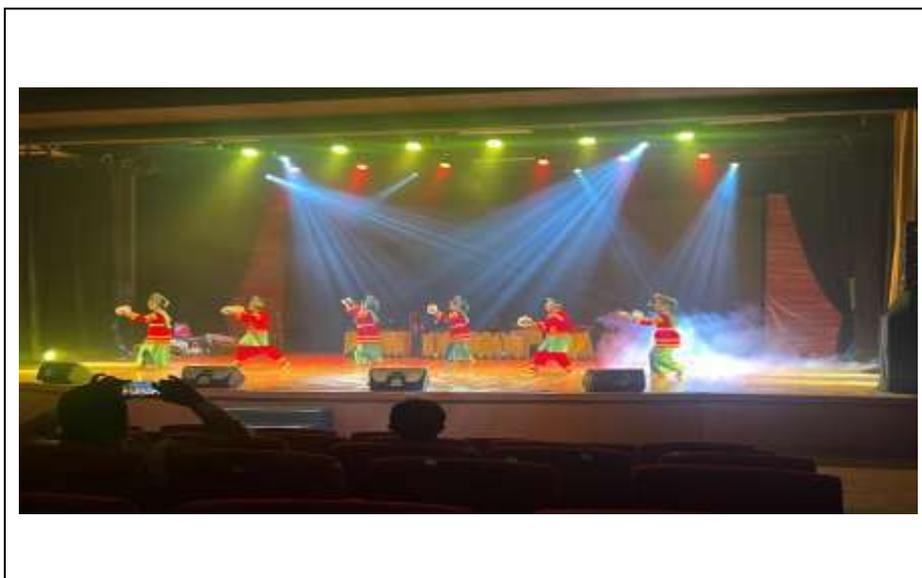
5. Kegiatan Warna Warni Budaya Nusantara

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pagelaran Tari dari beberapa Badan Penghubung Provinsi seluruh Indonesia. Dari Badan Penghubung menampilkan 3 tari khas Minangkabau dari Sanggar Tari Minangkabau.



6. Parade Tari Nusantara

Kegiatan Parade Tari Nusantara merupakan agenda wajib Taman Mini yang diikuti oleh beberapa Anjungan Daerah seluruh Indonesia menampilkan kesenian khas daerah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di Gedung Sasono Langgeng Budoyo Taman Mini.



7. Kerjasama Promosi (Festival Gamad) dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta Pusat tanggal Festival Gamad di Bandung 9 Desember 2023. Kegiatan ini menampilkan salah satu jenis musik tradisional populer Minangkabau yaitu "Gamaik" yang menampilkan Grup musik SPD Sampai Hati.



8. Kegiatan Alek Nagari Salingka Budaya yang juga menampilkan pagelaran Gamad di Bogor tanggal 10 Desember 2023 di GOR Padjajaran yang bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Minang Jabodetabek.



9. Pekan Desember di Anjungan Sumatera Barat TMII

Pekan Desember/ Akhir Tahun dilaksanakan pada tanggal 16-31 Desember 2023 di Anjungan di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan ini menampilkan Kesenian Khas Sumatera Barat serta bazaar makanan khas Sumatera Barat.



Semua aktifitas promosi diatas dilaksanakan dengan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya.

Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$75.00\% = \frac{9 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak **75.00%** dengan kategori **“Sedang”**.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2023 dengan tahun -tahun sebelumnya

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023 (n)	Capaian Tahun 2022 (n-1)	Capaian Tahun 2021 (n-2)
		2023				
		Target	Realisasi	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75,00%	116,67%	-

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021, 2022 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 yang mencapai **116,67%** memang mengalami penurunan secara persentase namun dalam intensitas pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah mengalami peningkatan yaitu dari **7** (tujuh) kali pada tahun lalu menjadi **9** (Sembilan) kali pelaksanaan dalam tahun ini. Namun untuk perbandingan Capaian dengan Tahun 2021 tidak dapat dilakukan karena Indikator Kinerja tersebut baru pada tahun 2022.

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75.00 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.29 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat sampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 75% target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan pulihnya situasi pariwisata dan ekonomi pasca pandemi walaupun terkendala dengan Revitalisasi Taman Mini oleh pihak pengelola PT.Taman Wisata Candi (TWC) namun Badan Penghubung terus melakukan koordinasi yang baik dengan Lembaga, instansi terkait maupun pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah agar sasaran strategis dapat tercapai dengan baik dan potensi daerah serta ciri khas Sumatera Barat, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon hingga kuliner khas daerah dapat lebih terekspose ke turis domestik bahkan mancanegara.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2023 terealisasi sebesar **75.00%** dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori **“Sedang”** yang berarti gradasi cukup menunjukkan pencapaian /realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Anjungan Sumatera Barat yang strategis dan sebagai primadona di TMII untuk tingkat kunjungan tamu negara maupun tourist biasa di TMII adalah peluang penyebaran informasi daerah secara global kepada pengunjung domestik dan mancanegara. Membaiknya situasi ekonomi dan pariwisata pasca COVID dan telah selesainya Revitalisasi Taman Mini sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Promosi potensi Daerah Sumatera Barat, baik dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah maupun tempat lain di Jakarta atau Provinsi Lainnya.
- b). Koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan.
- c). Banyaknya ajakan kerjasama promosi dari berbagai pihak baik swasta, organisasi/lembaga pemerintahan maupun non pemerintah, organisasi masyarakat serta penawaran fasilitasi promosi daerah dari berbagai sanggar seni, kelompok masyarakat yang peduli seni budaya daerah sehingga perlu adanya perencanaan program promosi untuk mengakomodir semua peluang promosi tersebut.
- c). Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak swasta seperti Hotel Borobudur untuk membantu memfasilitasi untuk mempromosikan produk-produk unggulan dan kuliner khas Sumatera Barat.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat didukung oleh 2 orang ASN Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata serta 1 orang ASN Penata Pameran pada Seksi Promosi Daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemberian informasi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melakukan pemberian promosi potensi Daerah Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat dengan target 12 kali pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 9 kali dengan tingkat capaian sebesar 75.00%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 836.908.000,- dengan realisasi sebesar Rp 825.725.588,- atau sebesar 98.66%. Anggaran ini berada pada Program Pelayanan Penghubung pada 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan Sub Kegiatan

Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 836.908.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 75.00%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 825.725.588,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp.836.908.000 \times 75.00\%) - Rp.825.725.588}{(836.908.000 \times 75.00\%)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -31.55 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi capaian Indikator Kinerja tersebut sebesar -31.55% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 836.908.000,- yang terealisasi sebesar Rp 825.725.588,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di Sumatera Barat dengan capaian indikator kinerjasebesar 75.00 %. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat Capaian Kinerja untuk Indikator ini yang hanya masuk dalam kategori **Sedang**. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Jumlah pelaksanaan Promosi Potensi Daerah di Sumatera Barat.

Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	247.940.000	247.665.169	99,89%	274.831
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	588.968.000	578.060.419	98,15%	10.907.581

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.31
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Promosi Potensi dan penyebarluasan Informasi Daerah di luar Sumatera Barat	12 kali	9 kali	75,00%
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat mencapai target sebanyak **75,00%** yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

2. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023	Kategori
		2023			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67 %	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Selain melaksanakan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, Badan Penghubung juga melaksanakan Fasilitasi di bidang Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat di Jakarta dan di luar Sumatera Barat. Pada tahun 2023 dilaksanakan 17 (tujuh belas) kali fasilitasi promosi yaitu:

1. IKA Meranti dilaksanakan tanggal 7 Januari 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII;



2. IKSBS, Ikatan Keluarga Sungai Buluh Sekitarnya tanggal 4 Maret 2023;
3. IKAPAS, Ikatan Keluarga Pasaman tanggal 15 Januari 2023;
4. IKAS (Ikatan Keluarga Singgauang Pariaman) dilaksanakan tanggal 12 Maret 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII dengan menampilkan pawai pakaian adat khas daerah berkeliling di Taman Mini;



5. IK Tapis, (Ikatan Keluarga Tanjung Pisang) tanggal 18 Maret 2023;
6. IKS (Ikatan Keluarga Solok) tanggal 25 Juni 2023;



7. Promosi Pariwisata Kota Padang tanggal 16 Juli 2023;



8. Nagari Limau Lunggo Baralek Gadang (Solok) tanggal 19 Agustus 2023 mengusung tema “Tradisi Balimau Patang”.



9. Bundo Kandung DKI Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 2023. Pada kegiatan ini melaksanakan Bararak di Anjungan Sumbar TMII dan memperkenalkan Tradisi Makan Bajamba;



10. COCF (*Colors of Culture Festival*) dilaksanakan di tempat wisata Kota Tua Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023 membawa Tim Kesenian Dinas Pariwisata Kota Padang dengan penampilan Tari dan Musik Minangkabau;



11. Fasilitasi Induk Keluarga Minang, Penampilan Seni Budaya Minang tanggal 14 Oktober 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.



12. Fasilitasi Penampilan Seni Budaya Minang Bundo Kandung tanggal 21 Oktober 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.



13. Ikatan Keluarga Padang Magek tanggal 23 Desember 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII.



14. Pagelaran Kesenian Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 24 Desember 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII menampilkan pakaian khas dan tarian asal Kabupaten Lima Puluh Kota.



15. Sanggar Anak Indonesia Kota Padang tanggal 25 Desember 2023



16. Sanggar Gelatik Kota Solok Kota Solok tanggal 25 Desember 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII.



17. Sanggar Suluh Gelanggang Kabupaten Solok tanggal 25 Desember 2023 di Anjungan Sumatera Barat TMII.



5. Penampilan Seni Budaya dari Sanggar Suluh Gelanggang dari Kota Solok di Anjungan Sumatera Barat TMII.



Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$141,67\% = \frac{17 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan fasilitas promosi potensi daerah tercapai sebanyak **141,67%** dengan kategori “**Sangat Tinggi**” .

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2023, 2022 dan 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2023 (n)	Capaian Tahun 2022 (n-1)	Capaian Tahun 2021 (n-2)
		2023		%	%	%
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67%	100%	80,00%

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021, 2022 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 yang mencapai **100%**, pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan baik dalam persentase maupun dalam kali pelaksanaan, yaitu dari 2 (dua) kali pelaksanaan di tahun 2022 menjadi 17 (tujuh belas) kali realisasi pelaksanaan di tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terlaksana sebanyak 4 (empat) kali fasilitasi maka juga mengalami peningkatan pelaksanaan.

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/ RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	17 kali	141,67 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.34 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat sampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 141,67% target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan fasilitas promosi tahun 2023 lebih banyak terlaksana disebabkan beberapa faktor pendukung yang telah disebutkan diatas.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitas promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2023 terealisasi sebesar 141,67% dari target yang ditetapkan tahun 2023 dengan kategori Sangat Tinggi, walaupun terkendala keterbatasan ketersediaan Anggaran pada DPA Badan Penghubung untuk fasilitas pelaksanaan Acara/Kegiatan Promosi Potensi Daerah dengan Skala Besar, namun Badan Penghubung terus melaksanakan koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat budaya atau kesenian tradisional Sumatera Barat untuk

menjembatani kerjasama dalam fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan dan melaksanakan kegiatan tersebut pada Tahun 2023. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam persentase dan dalam kali pelaksanaan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a). Lokasi Anjungan Sumatera Barat yang strategis dan salah satu Anjungan favorit di TMII untuk tempat kunjungan tamu negara maupun turis domestik adalah peluang penyebaran informasi daerah secara global. Membaiknya situasi ekonomi dan pariwisata pasca COVID dan telah selesainya Revitalisasi Taman Mini sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat .
- b). Koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan.
- c). Banyaknya permintaan kerjasama promosi dari berbagai pihak baik swasta, organisasi/lembaga pemerintahan maupun non pemerintah, organisasi masyarakat serta penawaran fasilitasi promosi daerah dari berbagai sanggar seni, kelompok masyarakat yang peduli seni budaya daerah, baik dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah maupun tempat lain di Jakarta atau Provinsi Lainnya.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian

informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah faslitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh 2 orang ASN Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata serta 1 orang ASN Penata Pameran pada Seksi Promosi Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fasilitasi promosi potensi Daerah Sumatera Barat di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yaitu melaksanakan fasilitasi pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah faslitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target 12 kali pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 17 kali dengan tingkat capaian sebesar 141.67%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 836.908.000,- dengan realisasi sebesar Rp 825.725.588,- atau sebesar 98.66%. Anggaran ini berada pada Program Pelayanan Penghubung pada 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya. Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 836.908.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 141.67%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 825.725.588,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.836.908.000} \times 141.67\%) - \text{Rp.825.725.588}}{(836.908.000 \times 141.67\%)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 30.36 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 30.36% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 836.908.000,- yang terealisasi sebesar Rp 825.725.588,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat dengan capaian indikator kinerja sebesar 141.67%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	247.940.000	247.665.169	99,89%	274.831
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	588.968.000	578.060.419	98,15%	10.907.581

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2023

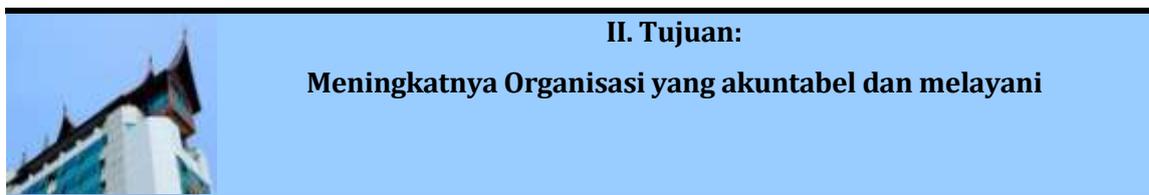
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Realisasi Capaian Kinerja fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	12 kali	17 kali	141,67%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah fasilitasi Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tercapai melebihi target sebanyak 141,67% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

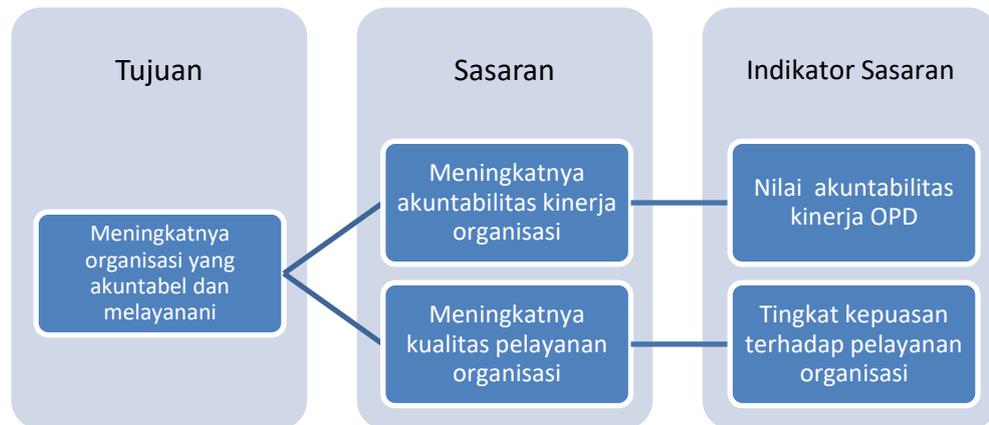
Tabel 3.37
Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (63.83)	96,71%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					96,71%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78,20%)	Baik (81,50%)	104,22%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5					104,22%
Rata-Rata Capaian Indikator					100,47%

Sumber : Hasil Laporan Evaluasi Inspektorat dan Survey melalui kuesioner

Dari tabel 3.37 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indicator tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah sebesar 100.47%.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 : Tujuan II dan Sasaran Strategis

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah hasil kerja dari organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun Anggaran keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Sasaran Strategis keempat Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yaitu yang diukur dengan Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (30%),

3. Pelaporan Kinerja (15%),

4. Evaluasi internal (25%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Permenpan 12 tahun 2015 dengan kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38

Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Kategori	Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi,sertapengukuran kinerja telah

			dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unitkerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.39

Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	------------------------	--------	-----------	---------

1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (63.83)	96,71%
---	---	-----------------------------------	-----------	-----------	--------

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 mendapat nilai **63.83** dengan kategori B (interpretasi BAIK), artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30% dinilai 23,10%
- 2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25% dinilai 18,01%
- 3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15% dinilai 10.35%
- 4) Evaluasi internal dengan bobot 25% dinilai 12,37%

Prediket evaluasi SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Tugas Nomor 700/0058/Insp-SAU/2023 tanggal 6 Februari 2023, Nomor 700/0089/Insp-SAU/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Nomor 700/0198/Insp-SAU/2023 tanggal 3 April 2023.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$96,71\% = \frac{63.83}{66.00} \times 100\%$$

Dari tabel 3.39 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 adalah B (**66.00**), sedangkan realisasinya adalah B (**63.83**) maka tingkat capaiannya **96,71%**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja OPD tahun 2023 termasuk kategori kinerja "**Sangat Tinggi**".

1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun- tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.40

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023, 2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023 %	Capaian 2022 (n-1) %	Capaian 2021 (n-2) %
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	B (66.00)	B (63.83)	B (96.71)	B (62.82) (95.18)	B (60,04) (85.77)

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari Tabel 3.40 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu B dengan nilai **63.83** dan secara capaian persentase juga mengalami peningkatan. Dibanding Capaian Tahun 2021, Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja.

1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
-----------	----------------------	-----------	------------------

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70)	B (63.83)	91,19 %
--------------------------------------	---------	-----------	---------

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.41 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai akuntabilitas kinerja” pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir Renstra yaitu baru mencapai 63.83 atau dengan capaian sebesar 91,19%. Capaian kinerja ini akan menjadi perhatian Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 terealisasi sebesar 96,71% dari target yang ditetapkan tahun 2023 dengan kategori Sangat Tinggi dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pada tahun 2023 Badan Penghubung mengalami peningkatan dalam nilai evaluasi SAKIP secara keseluruhan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari level Kepala Badan sampai dengan Staf termasuk target kinerjanya secara proporsional melalui proses cascading kinerja;
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- Melakukan pengentryan dokumen perencanaan Badan Penghubung ke website <https://sakup.sumbarprov.go.id/versi2023>. E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Website ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan

dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan;

- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun lalu yang dikeluarkan oleh Inspektorat dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 45 ASN Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural dan sedikit pada level Pelaksana/Staf atau hanya mencapai 50 % dari total ASN pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 63.83% dari target 66.00% dengan tingkat capaian sebesar 96.71%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 6.485.600.191,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.444.519.741,- atau sebesar 99,37%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan dengan 6 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 3) Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 6.485.600.911,- CK =

Capaian Kinerja (%) = 96.71%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 6.444.519.741,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\frac{(Rp\ 6.485.600.911 \times 96.71\%) - Rp\ 6.444.519.741}{(Rp\ 6.485.600.911 \times 96.71\%)}}{Rp\ 6.272.223.945 - Rp\ 6.485.600.911} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -3,40$$

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Capaian Kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebesar -3,40% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 6.485.600.911,- yang terealisasi sebesar Rp 6.444.519.741,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 96.71%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Fisik	REALISASI Keuangan		KETR. (SISA ANGGARAN)
				%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TOTAL ANGGARAN	6.485.600.911	100	6.444.519.741	99,37	41.081.170
I	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	6.485.600.911	100	6.444.519.741	99,37	41.081.170
	5.07.01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.832.200	100	112.701.183	94,84	6.131.017
1	5.07.01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.032.200	100	92.689.383	97,53	2.342.817
2	5.07.01 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	9.920.000	100	8.719.000	87,89	1.201.000
3	5.07.01 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.880.000	100	11.292.800	81,36	2.587.200
	5.07.01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.366.768.711	100	6.331.818.558	99,45	34.950.153
4	5.07.01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.162.258.711	100	6.128.729.908	99,46	33.528.803
5	5.07.01 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.170.000	100	190.769.100	99,27	1.400.900
6	5.07.01 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.340.000	100	12.319.550	99,83	20.450

Dari tabel 3.42 dapat dilihat bahwa efisiensi telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 2.587.200,- atau sebesar 18,64 %.

Selain anggaran efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah dengan menetapkan anggaran dan merealisasikan belanja pegawai dan belanja barang jasa seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya

pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

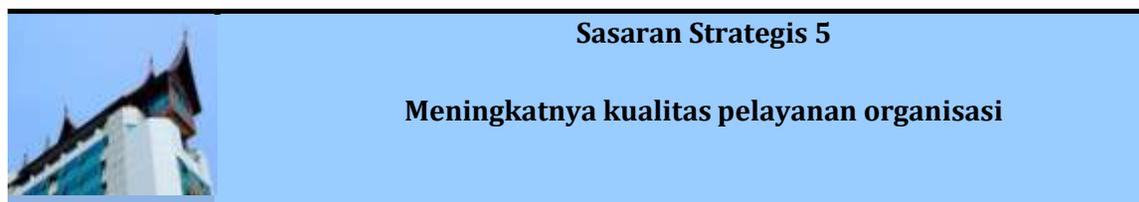
Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	45 orang	90%
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	11 orang	11 orang	100%
			Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N	12 kali	12 kali	100%
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi tercapai sesuai target diatas 90% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2023 Badan Penghubung telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Reviu dan perbaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;

- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun lalu yang dikeluarkan oleh Inspektorat dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menyusun matriks tindak lanjut;
- Monitoring berkala atas pencapaian Rencana Aksi yang disusun awal tahun.



Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi yang diukur dengan tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat/Organisasi yang menjadi *stakeholder* dari OPD yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran adalah:

Tabel 3.44

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN :

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepadapengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat penggunalayanan. Survei ini dilakukan dengan kuesioner dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Tahun 2023 dilaksanakan survey dengan pembagian kuesioner pelayanan publik, baik fisik maupun via e-survei (melalui *google form* dengan format yang sama) pada beberapa responden *stakeholders* Badan Penghubung yang terdiri dari Ajudan/Protokoler Pimpinan Daerah yang diberikan Pelayanan, Organisasi Masyarakat Perantau Minang, Mahasiswa Asrama yang dibina, OPD/ASN yang difasilitasi pengurusan kepentingannya serta para pengunjung Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini. Total pertanyaan pada kuesioner sebanyak 11 pertanyaan pilihan berganda dengan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Total kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 78 responden dengan hasil pengolahan sebagai berikut:

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai pengolahan kuesioner:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$81,50\% = \frac{2797}{3432} \times 100\%$$

Dari penghitungan pengolahan kuesioner yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai **81.50%** maka pelayanan Badan Penghubung terhadap *stakeholdersnya* tergolong Mutu Pelayanan **B** dengan Kinerja Unit Pelayanan **BAIK**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$104.22 \% = \frac{81.50}{78.20} \times 100\%$$

Tabel 3.45
Pencapaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	78.20	81.50	104,22%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**Sangat Tinggi**”.

2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 3.46

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD Tahun 2023,2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023 %	Capaian 2022 (n-1) %	Capaian 2021 (n-2) %
1	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD	Nilai	B (78.20)	B (81,50)	104.22% (Memuaskan)	108.95 % (Memuaskan)	-

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tahun 2022 memang mengalami penurunan dalam hal persentase capaian, namun jika dilihat dari jumlah responden yang diukur penilaiannya maka tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari 37 responden menjadi 78 responden atau sekitar 211%. Namun tentu saja Badan Penghubung akan terus berusaha meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan terhadap semua *Stakeholders* agar capaian Tingkat kepuasn terhadap pelayanan OPD tahun mendatang akan meningkat.

2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan OPD dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.47

Perbandingan Capaian Indikator Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD	Baik (80)	B (81.50)	101.88%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.47 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” pada tahun 2023 telah melampaui target akhir Renstra yaitu 80.00 atau dengan capaian sebesar 101.88%. Capaian kinerja ini tentu akan menjadi pemicu bagi Badan Penghubung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* yang dilayaninya.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi tahun 2023 terealisasi sebesar 104,22% dari target yang ditetapkan tahun 2023 dengan kategori **Sangat Tinggi**. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

Usaha perbaikan dalam peningkatan pelayanan publik atau *stakeholders* yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penambahan tenaga pelayanan pimpinan daerah baik itu tenaga protokol ataupun supir pimpinan;

- Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan melalui mekanisme sewa kendaraan operasional;
- Terus melakukan koordinasi dan *Sharing* Informasi ke Biro Administrasi Pimpinan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya terkait pelayanan pimpinan dan pengurusan kepentingan daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan organisasi/paguyuban masyarakat rantau Sumatera Barat, baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat terkait sumber potensial promosi daerah;
- Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, penggiat seni dan budaya Minangkabau dalam hal promosi potensi daerah Sumatera Barat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2024 Badan Penghubung akan melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Saat ini di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terdapat 46 orang ASN serta 35 orang tenaga *outsourcing* protokol ataupun supir pimpinan, tenaga pelayanan informasi promosi daerah, tenaga kebersihan dan keamanan yang tersebar di Anjungan Sumatera Barat serta Asrama Mahasiswa Minang Bogordalam rangka peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung kepada

stakeholdersnya.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pejabat dan pimpinan daerah melalui mekanisme sewa kendaraan operasional. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 96,93% dari target 86% dengan tingkat capaian sebesar 112,71%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung sebesar Rp 9.103.516.353,- dan telah terealisasi sebesar Rp 8.354.678.025,- atau sebesar 91.77%. Anggaran ini tersebar pada 7 kegiatan dengan 22 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 9.103.516.353,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 104.22%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 8.354.678.025,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp.9.103.516.353 \times 104.22\%) - Rp.8.354.678.025}{(9.103.516.353 \times 104.22\%)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.9.487.684.743}) - \text{Rp.8.354.678.025}}{(9.487.684.743)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 11.94 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 11.94% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 9.103.516.353,- yang terealisasi sebesar Rp 8.354.678.025,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 104.22%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut:

Tabel 3.48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETR. (SISA ANGGARAN)	
			Fisik %	Keuangan Rp.		
2	3	4	5	6	7	8
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	224.017.000	100	165.095.851	73,70	58.921.149
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	212.880.000	100	159.047.351	74,71	53.832.649
5.07.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.231.000	100	3.973.500	93,91	257.500
5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.906.000	100	2.075.000	30,05	4.831.000
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.988.000	100	41.791.978	95,01	2.196.022
5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43.988.000	100	41.791.978	95,01	2.196.022
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.549.946.649	100	1.533.222.785	98,92	16.723.864
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.007.800	100	41.428.419	98,62	579.381
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	449.219.710	100	445.790.982	99,24	3.428.728
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.273.695	100	140.797.206	97,59	3.476.489
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.617.500	100	42.616.380	100,00	1.120
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.200.000	100	60.290.467	96,93	1.909.533
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809.627.944	100	802.299.331	99,09	7.328.613
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.716.800	100	325.011.440	73,08	119.705.360
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.061.800	100	181.388.540	98,55	2.673.260
5.07.01.1.07.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.655.000	100	143.622.900	99,98	32.100
5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.000.000	100	-	0,00	117.000.000
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.391.793.100	100	2.337.006.437	97,71	54.786.663
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.750.000	100	17.551.242	98,88	198.758
5.07.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.448.000	100	363.867.397	95,64	16.580.603
5.07.01.1.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1.993.595.100	100	1.955.587.798	98,09	38.007.302
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.376.526.000	100	1.002.449.245	72,82	374.076.755
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.350.000	100	359.022.495	90,81	36.327.505
5.07.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	31.400.000	100	11.800.000	37,58	19.600.000
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.950.000	100	57.376.750	83,22	11.573.250
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	828.746.000	100	524.500.000	63,29	304.246.000
5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.080.000	100	49.750.000	95,53	2.330.000
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.072.528.804	100	2.950.100.289	96,02	122.428.515
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.072.528.804	100	2.950.100.289	96,02	122.428.515
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.072.528.804	100	2.950.100.289	96,02	122.428.515
		9.103.516.353	700	8.354.678.025	91,77%	748.838.328

Dari tabel 3.48 dapat dilihat bahwa efisiensi yang telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 748.838.328 atau sebesar 8.23 %.

Selain anggaran efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah dengan merealisasikan belanja pengadaan dan pemeliharaan barang sesuai dengan tagihan, pembayaran belanja rutin bulanan seperti

tagihan listrik, air dan telepon sesuai dengan tagihan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49
Realisasi Capaian Kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29 unit	29 unit	100%
			- Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD	3 unit	3 unit	100%
	-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 0rang	5 orang	71,43%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	100%
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	100%
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 jenis	50 jenis	100%
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang	21 jenis	21 jenis	100%
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang dilayani	250 orang	250 orang	100%
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	80 laporan	85 laporan	106%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan yang diadakan	19 unit	19 unit	100%
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	2 unit	2 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang disediakan	1000 buah	1000 buah	100%
			- Jumlah paket yang dikirim	200 kg	230 kg	115%
			- Jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar	200 surat	150 surat	75%
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100%
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	33 orang	33 orang	100%
			- Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	41 unit	41 unit	100%
	-	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	4 unit	20%
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	30 unit	67%
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	12 unit	12 unit	100%
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					
	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	- jumlah mess yang disewa	2 unit	2 unit	100%
			- jumlah rumah jabatan yang disewa	1 unit	1 unit	100%
			- kendaraan dinas yang disewa	12 bulan	12 bulan	100%

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3.50
Tabel Anggaran Badan Penghubung Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 6.808.402.430,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.516.402.430,-

Pada Tahun 2023 Capaian Realisasi Fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung mencapai 100% sementara realisasi keuangan mencapai 95,74 %.

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Badan Penghubung Tahun 2023:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT							
BADAN PENGHUBUNG							
KEADAAN S/D AKHIR BULAN : 31 DESEMBER 2023							
OPD : BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROV. SUMBAR							
NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Fisik %	REALISASI Keuangan		KETR. (SISA ANGGARAN)
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TOTAL ANGGARAN	19.324.990.890	100	18.502.605.797	95,74	822.385.093
I	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.516.588.460	100	11.849.097.477	94,67	667.490.983
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.832.200	100	112.701.183	94,84	6.131.017
1	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.032.200	100	92.689.383	97,53	2.342.817
2	5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.920.000	100	8.719.000	87,89	1.201.000
3	5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.880.000	100	11.292.800	81,36	2.587.200
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.366.768.711	100	6.331.818.558	99,45	34.950.153
4	5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.162.258.711	100	6.128.729.908	99,46	33.528.803
5	5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.170.000	100	190.769.100	99,27	1.400.900
6	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.340.000	100	12.319.550	99,83	20.450
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	224.017.000	100	165.095.851	73,70	58.921.149
7	5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	212.880.000	100	159.047.351	74,71	53.832.649
8	5.07.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.231.000	100	3.973.500	93,91	257.500
9	5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.906.000	100	2.075.000	30,05	4.831.000
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.988.000	100	41.791.978	95,01	2.196.022
10	5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43.988.000	100	41.791.978	95,01	2.196.022
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.549.946.649	100	1.533.222.785	98,92	16.723.864
12	5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.007.800	100	41.428.419	98,62	579.381
13	5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	449.219.710	100	445.790.982	99,24	3.428.728
14	5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.273.695	100	140.797.206	97,59	3.476.489
15	5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.617.500	100	42.616.380	100,00	1.120
17	5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.200.000	100	60.290.467	96,93	1.909.533
18	5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809.627.944	100	802.299.331	99,09	7.328.613
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.716.800	100	325.011.440	73,08	119.705.360
20	5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.061.800	100	181.388.540	98,55	2.673.260
21	5.07.01.1.07.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.655.000	100	143.622.900	99,98	32.100
22	5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.000.000	100	-	0,00	117.000.000
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.391.793.100	100	2.337.006.437	97,71	54.786.663
23	5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.750.000	100	17.551.242	98,88	198.758
24	5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.448.000	100	363.867.397	95,64	16.580.603
25	5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.993.595.100	100	1.955.587.798	98,09	38.007.302
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.376.526.000	100	1.002.449.245	72,82	374.076.755
26	5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.350.000	100	359.022.495	90,81	36.327.505
27	5.07.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	31.400.000	100	11.800.000	37,58	19.600.000
28	5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.950.000	100	57.376.750	83,22	11.573.250
29	5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	828.746.000	100	524.500.000	63,29	304.246.000
30	5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.080.000	100	49.750.000	95,53	2.330.000
II	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.808.402.430	100	6.653.508.320	97,72	154.894.110
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.808.402.430	100	6.653.508.320	97,72	154.894.110
31	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.072.528.804	100	2.950.100.289	96,02	122.428.515
32	5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	421.833.400	100	415.465.445	98,49	6.367.955
33	5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	247.940.000	100	247.665.169	99,89	274.831
34	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	588.968.000	100	578.060.419	98,15	10.907.581
35	5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.477.132.226	100	2.462.216.998	99,40	14.915.228

Pada tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran serta visi dan misi Pemerintah Daerah yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi RPJMD serta tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan masing-masing Analisa Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan, semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja bahkan ada yang melebihi dari 100% yaitu pada Sasaran kedua dan ketiga. Secara rata-rata Capaian Sasaran Strategis Badan Penghubung pada tahun 2023 yaitu **102,69%** dengan kategori "**Sangat Tinggi**".

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- f. Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis SKPD Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026 dengan capaian kinerja memuaskan. Masih terdapat upaya-upaya perbaikan kinerja yang harus dilaksanakan pimpinan dan staf Badan Penghubung untuk mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dibuat. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 - 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : penghubung@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D**
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2023

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan 2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	12 kali 4 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 12 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	66.00 (B)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	78.20 (Baik)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 5.999.147.356,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.734.495.127,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 18.733.642.483,-	

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.M.Soc.Sc.Ph.D
 Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 - 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : penghubung@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARI ANGRAINI, ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D**

Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D
Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

PIHAK PERTAMA,

SARI ANGRAINI, ST
NIP.19820523 201001 2 014

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

UPTD/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIAT : SUB BAGIAN TATA UAHA
SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI

TAHUN : 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi	Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP	20.26
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan Organisasi	Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP	10.07
3.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP	6.30
4.	Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	Persentase Pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan	75 %
5.	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	1. Persentase Layanan administrasi kepegawaian sesuai SOP 2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP 3. Persentase Layanan Sarana prasarana sesuai SOP	100 % 100 % 100 %
6.	Meningkatnya pengelolaan BMD	1. Persentase BMD dalam kondisi baik 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana pendukung kinerja	100 % 80 %
7.	Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi	1. Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	83 orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 128.942.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.435.543.087,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 247.472.444,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 199.939.000,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.082.209.556,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 350.969.940,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.439.519.100,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 849.900.000,-	APBD
9.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Rp. 3.206.000.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 15.940.495.127,-	

Padang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,


PIHAK PERTAMA,



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D

Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

SARI ANGRAINI, ST

NIP.19820523 201001 2 014



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya, Nomor 19, Telp (021)8510744, 8580889, Fax.8580889, Jakarta 13140
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id> Email:kpenghubung_sumbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESRAMADANUS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Humas Protokol dan Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASCHARI CAHYADITAMA, SSTP, M.Soc.Sc, Ph.D**

Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta , Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ASCHARI CAHYADITAMA, SSTP, M.Soc.Sc, Ph.D
Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

PIHAK PERTAMA,

DESRAMADANUS, S.Sos
NIP. 19670905 199003 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

**UPTD/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIAT : KEPALA SEKSI HUMAS PROTOKOL
DAN PELAYANAN**

**SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI
TAHUN : 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terfasilitasinya Koordinasi pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat /Lembaga Lainnya	Jumlah Pejabat Daerah/ Tamu yang dilayani	240	Kegiatan
		Jumlah Konsultasi Pemerintah Daerah yang difasilitasi	50	Kegiatan
2	Terfasilitasinya Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Publikasi kegiatan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	120	Kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp. 1.699.405.956,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.699.405.956,-	

Jakarta , Januari 2023

PIHAK KEDUA


ASCHARI CAHYADITAMA, SSTP, M.Soc.Sc, Ph.D
Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

PIHAK PERTAMA


DESRAMADANUS, S.Sos
NIP. 19670905 199003 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021-85909008, Fax. 850889
Website: <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email: penghubung@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOS MEDINOV, ST, M.Si
Jabatan : Kasi Hubungan Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP. M.Soc. Sc., Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Penghubung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

PIHAK PERTAMA

YOS MEDINOV, ST, M.Si
NIP. 19681115 200003 1 003

PIHAK KEDUA

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP., M.Soc.Sc., Ph.D
Pembina Tk. I/NIP. 19800904 199810 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

SEKSI : **SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**
JABATAN : **KEPALA SEKSI**
TAHUN : **2023**

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya pengurusan administrasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/lembaga lainnya	1. Jumlah surat izin yang difasilitasi 2. Jumlah keputusan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang diurus 3. Jumlah surat atau kepentingan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, instansi atau lembaga lainnya yang diurus	15surat 15 SK 200 surat
2	Terjalinnnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan perantau.	1. Jumlah organisasi masyarakat perantau yang dilibatkan 2. Persentase permasalahan perantau yang difasilitasi	12kali 100 %
3	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan terhadap mahasiswa Sumatera Barat di rantau	1. Jumlah mahasiswa/mahasiswi di asrama yang dilayani 2. Jumlah mahasiswa/mahasiswi asal Sumatera Barat yang dibina	124 orang 200 orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pelayanan kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Rp. 421.833.400	APBD

PIHAK KEDUA

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP., M.Soc.Sc., Ph.D
 Pembina Tk. I/NIP. 19800904 199810 1 002

Jakarta, Januari 2023

PIHAK PERTAMA

YOS MEDINOV, ST, M.Si
 NIP. 19681115 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 - 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : kpenghubung_sumbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Virse Dwi Rozanita,SH.MM
Jabatan : Kasi Promosi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP. M.Soc.Sc. Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Penghubung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA


ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D

Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

PIHAK PERTAMA


VIRSE DWI ROZANITA,SH.MM

Pembina Tk.I/NIP.196709051990032002

PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKSI : SEKSI PROMOSI DAN INVESTASI
 JABATAN : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terinformasikannya promosi daerah Sumatera Barat	1. Jumlah materi informasi daerah yang dipromosikan 2. Jumlah pengunjung yang diberikan informasi potensi daerah Sumatera Barat	2 jenis 10.000 org
2	Meningkatnya koordinasi promosi dengan instansi/ lembaga terkait	1. Jumlah koordinasi dengan instansi/ lembaga yang dilakukan	12 kali

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp. 247.940.000,-	APBD
2.	Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp. 423.968.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 671.908.000,-	

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D

Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002

PIHAK PERTAMA

VIRSE DWI ROZANITA, SH,MM

Pembina Tk.I/NIP. 19670905 199003 2 002